

Polisi 34-96-205

MEMBANGUN POLISI PEMBANGUNAN

Oleh Emil Salim *)

Hari ini genap limapuluh tahun yang lalu, pada tanggal 17 Juni 1946, Menteri Dalam Negeri, R.A.A. Wiranatakusumah, memutuskan dibentuknya Sekolah Polisi Negara yang terdiri dari Bagian Rendah di Sukabumi dan Bagian Menengah dan Tinggi di Mertoyudan dekat Magelang.

Setahun kemudian pada tanggal 17 Juni 1947 diresmikan pembukaan Polisi Akademi di Mertoyudan, yang kemudian pada tanggal 1 September 1950 diganti namanya menjadi Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Dua tahun kemudian diwisuda lulusan PTIK angkatan pertama yang diberi nama Angkatan Parikesit sebanyak 16 lulusan bergelar Doctorandus, antara lain Drs. Djoenarso, Drs. Hoengeng Imam Santoso, Drs. Mardjaman Tjokrodiredjo, Drs. Moerhadi Danoewilogo, Drs. Oetarman, Drs. Ostenrik Tjiro Soenarjo, Drs. J.S.Ranaatmadja, Drs. Siswadji, Drs. Soebroto Brotodiredjo, Drs. Soedijono, Drs. Soedjono Partodidjojo, Drs. Mohamad Soehardjo Soerjobroto, Drs. Soekahar, Drs. Soeroso dan Drs. W.F. Sumampouw.

Ketua Dewan Gurubesar PTIK yang mewisuda angkatan pertama

Parikesit ini adalah Prof. Mr. Djoko-soetono yang menggantikan Prof. Dr. Mr. R. Soepomo.

Kepala Kepolisian Indonesia Pusat yang pertama diangkat oleh Pemerintah Republik Indonesia adalah Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo pada tanggal 29 September 1945 dan Jawatan Kepolisian Indonesia ditempatkan sebagai bagian dari Kementerian Dalam Negeri RI.

Untuk menghadapi kekuatan militer Belanda yang sudah masuk Ibu Kota Jakarta, Jawatan Kepolisian Negara ditempatkan langsung di bawah pimpinan Perdana Menteri RI., Soetan Syahrir, pada tanggal 1 Juli 1946. Maka setiap tahun 1 Juli ini diperingati sebagai Hari Bha-yangkara.

Sembilan tahun kemudian pada tanggal 1 Juli 1955, Presiden Soekarno meresmikan "Tribrata" sebagai pedoman hidup anggota-anggota kepolisian yang kemudian menjadi kode etik profesi kepolisian dan menyatakan bahwa "Polisi" adalah :

1. Rastra sewakottama, Abdi utama dari Nusa dan Bangsa;
2. Negara yanotama, Warga Negara Utama dari Negara;
3. Yana anucasanadharma, wajib menjaga ketertiban pribadi dari rakyat."

*) Penulis adalah mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Dimasa Orde Baru pada tanggal 24 Agustus 1967 Angkatan Kepolisian bersama dengan Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara menjadi bagian dari Angkatan Bersenjata (ABRI) di bawah Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata.

Dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 79 tahun 1969 dinyatakan pembedaan tugas kewajiban antara Kepolisian dan Angkatan Perang Republik Indonesia bahwa pendekatan sosial dalam keamanan nasional adalah urusan Kepolisian sedangkan pendekatan pertahanan dan keamanan nasional adalah urusan Angkatan Perang.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia. LN 1982 Nomor 51 dinyatakan dalam pasal 30 ayat 4 bahwa: "Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum dan bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya membina ketenteraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat,
- b. melaksanakan tugas kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pe-

layan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggarakannya usaha dan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b ayat (4) pasal ini.

Dalam penjelasan pasal 30 ini pada ayat (4) huruf a dinyatakan: "Dalam melaksanakan tugasnya selaku alat negara penegak hukum dan menyelenggarakan ketentraman masyarakat, Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat."

Berdasarkan tugas pokok kepolisian ini ditarik fungsi utama kepolisian yang meliputi (1) inte- lejen dan pengamanan kepolisian; (2) reserse kepolisian; (3) kesam- ptaan kepolisian dan (4) bimbingan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas po- kok dan fungsi utama inilah Kepo- lisian berperan besar dalam pelaksana- an pembangunan Indonesia selama ini. Dan sebaliknya pembangunan In- donesia telah pula mengangkat ke- mampuan Kepolisian ke tingkat yang kita kenal sekarang ini.

Banyak fihak yang mengamati pembangunan Indonesia memberi penilaian positif, seperti baru-baru ini diungkapkan oleh Deputy Manage- ment Director Internasional Moneta- ry Fund, Staneley Fischer, dalam ma-

makalahnya "Sustaining Growth in the ASEAN Countries" (May 22, 1996) bahwa :

1. pertumbuhan pendapatan per jiwa penduduk melaju dengan rata-rata 4,8% setahun dalam masa 1971-1995 sementara dunia hanya mencatat 2,0% setahun;
2. laju pertumbuhan pendapatan per jiwa penduduk ini disertai dengan penurunan persentase jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan dari 60% (1970) menjadi 15% (1990) dibandingkan dengan Malaysia yang turun dari 18% menjadi 2% dan Thailand dari 26% menjadi 16% pada periode yang sama;
3. Indonesia bersama dengan Malaysia dan Thailand telah berhasil mengembangkan ekspor dan mengintegrasikan ekonominya dalam ekonomi dunia, yang kemudian mendorong kegiatan ekonomi dalam negeri, perdagangan antar regional, terutama dalam barang manufaktur.

Menurut "World Development Report 1995" yang diterbitkan Bank Dunia maka Indonesia "naik kelas" dari negara berpendapatan rendah (di bawah US\$ 700 per jiwa setahun) menjadi negara berpendapatan menengah dan ditahun 1993 sudah mencapai US\$ 740 per jiwa setahun di atas Mesir (US\$ 660), RRT (US\$ 490), Pakistan (US\$ 430) atau India (US\$ 300).

Begitu pula tingkat mortalitas bayi sebagai indikator tingkat kesehatan penduduk menunjukkan penurunan dari 118 bayi meninggal per 1000 bayi lahir (1970) menjadi 56 bayi yang meninggal (1993).

Di samping ini perlu pula diungkapkan peristiwa kejahatan yang berlangsung di tanah air dan menurut Biro Pusat Statistik berdasarkan sumber data Survei Sosial Ekonomi Nasional 1994 menunjukkan peningkatan jumlah peristiwa kejahatan dengan hampir 38%, yakni dari 1.3 juta peristiwa (1991) menjadi 1,8 juta (1993).

Seperti halnya pada tahun 1990 maka pada tahun 1993 propinsi Nusa Tenggara Barat merupakan propinsi dengan tingkat kejahatan tertinggi, yaitu 2.689 peristiwa kejahatan per 100.000 penduduk, disusul dengan Bengkulu (2.002) dan Sulawesi Selatan (1.630),

Jumlah kejahatan secara absolut tercatat tertinggi di Jawa Barat (261.120 peristiwa) namun karena jumlah penduduknya juga besar maka tingkat kejahatan per 100.000 penduduk hanyalah 689. Begitu pula Jawa Timur dengan 259.800 peristiwa kejahatan secara absolut mencatat per 100.000 penduduk hanya 777 peristiwa. Dan Jawa Tengah dengan 216.187 peristiwa kejahatan mencatat 738 tingkat kejahatan per 100.000 penduduk.

Sedangkan laju peningkatan kejahatan tertinggi antara 1990-1993

tercatat propinsi Sulawesi Selatan dengan kenaikan sebesar 165%.

Secara umum peristiwa kejahatan yang terbanyak di atas rata-rata 60% di bagian besar propinsi adalah pencurian ringan dan pencurian dengan pemberatan. Juga menarik bahwa selama Desember 1992-1993 peristiwa kejahatan cenderung baik dengan bulan Oktober sebagai puncaknya baik di daerah perkotaan maupun pedesaan.

Perlu dicatat bahwa secara keseluruhan hanya 37,5% peristiwa kejahatan yang menimpa korban dilaporkan kepada yang berwajib, di perkotaan 14,1% dan di pedesaan 23,4%. Dari komposisi kejahatan yang dilaporkan ternyata bahwa tidak ada satupun kejahatan narkoba yang dilaporkan kepada yang berwajib.

Di daerah perkotaan hanya 46% melaporkan peristiwa kejahatan kepada polisi/penyidik, sedangkan di pedesaan hanya 27,6%, selebihnya para aparat pemerintah, satuan keamanan dan pemuka masyarakat.

Adapun alasan di daerah perkotaan untuk tidak melaporkan adalah karena masyarakat merasa tidak ada gunanya (36,6%), tidak pantas melaporkannya (14,8%), karena dapat menyelesaikannya sendiri (14,5%), merasa khawatir akan merepotkan (9,5%), karena dianggap membuang waktu (10,9%). Situasi hampir serupa dijumpai di daerah pedesaan.

Dari 62,9% peristiwa kejahatan yang dilaporkan hanya bagian kecil

(2,9%) tidak dilayani, sedangkan 23,9% dilayani sampai selesai. Namun untuk perzinaan 94,3% dari yang dilaporkan, untuk perkosaan 75,5% dan untuk kejahatan penganiyaan berat 69,1% dari yang dilaporkan dapat diselesaikan.

Di lain pihak hanya 26,1% peristiwa kejahatan, 21,9% untuk pencurian dengan kekerasan dan 9,4% pembakaran bisa diselesaikan.

Demikianlah gambaran pembangunan dan hal-ihwal peristiwa kejahatan yang kita alami hingga kini. Masalahnya sekarang adalah bagaimana perspektif pembangunan dan pengembangan kepolisian dimasa depan? Bagaimanakah membangun polisi yang mampu menanggapi pembangunan dimasa depan?

Indonesia dalam masa depan memasuki abad ke-21 perlu memperhitungkan ciri-ciri pembangunan sebagai berikut : pertama adalah pembangunan dengan stabilitas. Pembangunan bukan hanya meningkatkan pendapatan, menghasilkan barang, tetapi adalah pula merombak struktur ekonomi dari pola lama yang didasarkan atas pola pengelolaan bahan mentah, seperti pertanian dan pertambangan, menjadi pola baru menghasilkan barang jadi melalui kegiatan industri manufaktur, jasa-jasa dan lain-lain. Dalam perombakan struktur ekonomi ini maka peranan ilmu dan teknologi semakin besar peranannya.

Pembangunan seperti ini juga berdampak pada perubahan struktur sosial. Jika semula kegiatan ekonomi berbasis di pedesaan, maka secara berangsur beralih keindustri manufaktur yang berbasis di perkotaan. Sehingga terjadilah proses urbanisasi yang menjadikan desa (contoh: Depok) menjadi kota, dan kota (contoh Jakarta) menjadi metropolitan.

Masyarakat Indonesia yang semula diwarnai dominasi ciri-ciri paguyuban (*Gemeinschaft*) kini berubah diwarnai ciri-ciri patembayan (*Gesellschaft*). Keakraban yang dikenal di pedesaan diganti dengan hubungan serba berhitung (*zakelijk*) di perkotaan. Perubahan sosial berlangsung cepat dengan mengugurkan sistem nilai yang lama namun belum dimanfaatkan dengan sistem nilai yang baru.

Dalam keadaan seperti ini maka pembangunan mengandung benih instabilitas. Sehingga diperlukan bukan hanya kebijakan stabilisasi ekonomi dengan mengendalikan laju inflasi, tetapi juga kebijakan stabilitas sosial dengan mengikuti irama dinamika perubahan masyarakat. Maka pendekatan sekuleritas perlu dikembangkan secara luwes mengikuti laju pertumbuhan masyarakat. Formula sekuritas yang berlaku dalam Pembangunan Jangka Panjang Pertama perlu disesuaikan dengan dinamika yang dihasilkan oleh proses pembangunan.

Dalam proses perubahan ini maka pendekatan sosial mungkin lebih relevan ketimbang pendekatan sekuritas, sehingga meningkatkan kebutuhan akan peranan kepolisian yang lebih menonjol dalam pola pembangunan dengan stabilitas.

Kedua adalah pembangunan dengan pemerataan. Pembangunan meningkatkan pendapatan adalah perlu dan penting, namun belum cukup. Dalam "Tinjauan Ekonomi Regional Indonesia" oleh Biro Pusat Statistik diungkapkan bahwa laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB, yakni jumlah barang dan jasa yang dihasilkan propinsi tanpa minyak bumi dan hasil-hasilnya) yang tertinggi dalam periode 1988-1993 adalah Irian Jaya dengan rata-rata 13,27% setahun disusul dengan Timor Timur dengan 9,53% setahun. Angka pertumbuhan PDRB kedua propinsi ini adalah jauh di atas rata-rata pertumbuhan nasional sebesar 7,68% setahun dalam masa 1988-1993. Apabila laju pertumbuhan PDRB adalah begitu besar, pertanyaan timbul mengapa kedua-dua daerah ini menderita gangguan keamanan ?

Adalah pula menarik bahwa sejumlah 98 pengusaha besar merasa perlu menandatangani Deklarasi Jimbaran-Bali yang, menurut dokumen "Program Kemitraan Usaha Nasional" dari Sekretariat Bersama Badan Pengurus Kemitraan Deklarasi Jimbaran-Bali (Jakarta 1996), mencerminkan komitmen mereka

"untuk tumbuh bersama dengan Usaha Skala Kecil Menengah sebagai perwujudan sikap kebangsaan di bidang ekonomi dengan berperan aktif sebagai peserta gerakan kemitraan usaha nasional, yang tercermin dari adanya dukungan bisnis nyata, penunjukan Direktur & Tim Kemitraan Usaha, adanya pembinaan-pembinaan dan dukungan dana operasional program Kemitraan usaha." Total anggaran yang sudah dikomit oleh 35 kelompok pengusaha besar pada tahap awal ini adalah Rp 1,3 triliun (1996).

Semua ini menggambarkan bahwa dimasa depan ciri pembangunan dengan pemerataan memerlukan pendekatan yang secara pro-aktif melibatkan masyarakat dalam pembangunan, sehingga pembangunan bukan hanya untuk masyarakat tetapi lebih-lebih memuat keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat membangun dirinya.

Ketiga adalah ciri pembangunan dengan efisiensi. Tingkat efisiensi Indonesia perlu ditingkatkan dengan memungkinkan mekanisme pasar bekerja dengan sempurna. Untuk ini berbagai hal yang menimbulkan distorsi harga perlu diiadakan, seperti pola "perdagangan terkendali" ("managed trading"), pemusatan (konsentrasi) kegiatan industri pada jumlah pengusaha yang terbatas, integrasi kegiatan industri secara vertikal dan horizontal pada beberapa pengusaha yang terbatas, pembatasan "masuk" (entry) atau "keluar" (exit)

bagi perusahaan dalam atau dari kelompok kegiatannya, dan demikian seterusnya hal-hal yang menghambat mengalirnya kegiatan ekonomi secara lancar.

Biaya perusahaan sering memuat pengeluaran yang tidak terikat langsung dengan kegiatan produktif perusahaan, seperti berbagai pungutan tak resmi, sehingga meninggalkan biaya ekonomi dan menurunkan tingkat efisiensi usaha.

Jika Indonesia mampu mengusahakan langkah-langkah perbaikan ini maka kita bisa mengejar ketertinggalan tingkat efisiensi kita dengan rekan-rekan negara ASEAN lainnya.

Keempat adalah pembangunan dengan wawasan lingkungan. Eksploitasi tanah, air dan hutan secara berlebihan menimbulkan kerusakan lingkungan seperti erosi dan banjir yang membawa penderitaan pada rakyat umum. Begitu pula limbah dan polusi yang dihasilkan pembangunan menambah beban penderitaan bagi rakyat umum. Sementara ini tingkat kesadaran masyarakat tentang lingkungan sudah semakin naik. Apabila kerusakan lingkungan sudah meliwati ambang kesabaran masyarakat dan tindakan tidak diambil oleh pihak yang berwajib, maka meletus kejadian di mana rakyat mencari penyelesaian sendiri dengan kekerasan.

Apabila pembangunan meningkat dimasa depan, namun kualitas lingkungan tidak membaik maka

ketegangan sosial akan kian meningkat. Lebih-lebih bila proses pembangunan diikuti dengan kepadatan penduduk yang naik dan tingkat kesadaran penduduk akan lingkungan asri meningkat, maka secara potensial situasi konflik mudah terpicu.

Kelima adalah pembangunan dengan orientasi global. Pembangunan dimasa depan didorong oleh perdagangan internasional sebagai lokomotif kemajuan. Revolusi teknologi transportasi, komunikasi dan informasi telah memperlancar arus barang, arus jasa, arus ilmu-teknologi dan arus informasi mengalir bebas antar negara. Pasar ASEAN membuka berbagai batas-batas antar negara aggotanya ditahun 2003. Begitu pula dinding-dinding ekonomi yang memisahkan negara satu dengan negara lain di kawasan Asia-Pasifik akan ikut tumbang ditahun 2010.

Indonesia harus mampu menyiapkan diri menjadikan tantangan pasar internasional-terbuka ini sebagai peluang. Jika bangsa kita mengembangkan kapasitas ekonominya untuk mampu mengeksport merebut pasar luar-negeri, maka impor barang luar negeri bisa dibendung oleh kemampuan meladeni pasar luar dan juga pasar dalam negeri.

Oleh karena itu kita harus mengembangkan ekonomi kita dengan orientasi global, merebut pasar luar-negeri. Ini memerlukan sikap juang yang penuh ("all out") mengatasi per-

saingan asing dan mengembangkan kemampuan diri.

Demikianlah lima ciri pembangunan yang perlu kita kembangkan menanggapi masa depan, yakni (1) pembangunan dengan stabilitas ekonomi dan stabilitas sosial; (2) pembangunan dengan pemerataan yang memuat aksesibilitas yang sama bagi semua untuk melibatkan diri dalam pembangunan; (3) pembangunan dengan efisiensi sebagai hasil pembahasan ekonomi pasar dari usaha pengkotakan dan distorsi yang menghambat mengalirnya usaha ekonomi secara lancar dalam masyarakat; (4) pembangunan dengan wawasan lingkungan agar masyarakat tidak dibebani beban kerusakan lingkungan yang merugikan dan generasi masa depan mendapat jaminan bahwa sumber daya alam tanah-air kita utuh tersedia untuk menopang naiknya tingkat kesejahteraan generasi akan datang; (5) pembangunan dengan orientasi global untuk memanfaatkan peluang perdagangan internasional menjadi lokomotif pembangunan nasional kita.

Benang merah yang terjalin dalam alur pembangunan masa depan adalah keberlanjutan dengan perubahan. Alur pembangunan akan senantiasa berlanjut namun dengan muatan perubahan.

Dan muatan perubahan ini menimbulkan potensi bagi meningkatnya kejahatan. United Nations

Research Institute for Social Development dalam laporannya "States of Disarray" (Maret 1995) mengungkapkan kecenderungan kriminalitas, yang tampak di dunia sekarang ini. **Dalil pertama** yang diajukan adalah bahwa "kejahatan adalah industri yang tumbuh". Menurut angka Perserikatan Bangsa-Bangsa maka rata-rata pertumbuhan peristiwa kejahatan yang dilaporkan dalam masa 1976-1986 secara global meningkat dengan 5% setahun, di atas laju pertumbuhan penduduk. Dan kita bisa menambahkan bahwa peristiwa kejahatan juga meningkat secara kualitatif. Kejahatan sudah menjadi semacam "industri" yang ikut berkembang dengan laju pembangunan ekonomi. Perubahan yang diakibatkan oleh pembangunan menyebabkan bahwa penduduk kehilangan jaringan dukungan tradisionalnya sehingga ia menderita pengasingan dan isolasi sehingga mudah menjadi mangsa kejahatan atau ia sendiri berkembang menjadi sumber kejahatan.

Dalil kedua bahwa persepsi tentang kejahatan tidak ditentukan oleh indikator objektif, seperti tingkat kesakitan atau kerusakan, tetapi oleh nilai-nilai budaya dan hubungan kekuasaan (power relations). Perselewahan antara perempuan dan lelaki dalam pola budaya Inggris misalnya ditanggapi lain dibandingkan dalam pola budaya Saudi Arabia. "Konflik kepentingan" oleh pejabat ditanggapi sebagai kejahatan serius di Singapura ketimbang di Jepang.

Kejahatan Pengusaha (corporate crime) seperti "insider trading" dalam bursa di Amerika Serikat dianggap sebagai kejahatan, namun tidak dianggap begitu oleh Jerman sebelum 1994.

Berdasarkan dalil kedua ini maka lahir pendapat bahwa kejahatan bukanlah proses legal semata-mata tetapi juga proses sosial - mencerminkan apa yang dipercayakan oleh masyarakat sebagai kejahatan. Dan bila masyarakat memiliki sikap paternalistik, mengikuti pola nilai pemegang - kekuasaan, maka peristiwa kejahatan apa yang ditangani mengikuti apa yang dianggap penting oleh penguasa. Inilah yang menjelaskan mengapa mafia di Sicilia, Italia bisa berlanjut tanpa tanggapan di tengah kehidupan masyarakat yang berjalan normal.

Dalil ketiga adalah bahwa kejahatan mencerminkan tidak hanya nilai-nilai penjahat tetapi juga nilai-nilai masyarakat sebagai keseluruhan. Jika masyarakat menganut sikap "tujuan menghalalkan cara pencapaiannya" maka berbagai pelanggaran dibenarkan asalkan membawa kita pada pencapaian tujuan.

Dalam mengejar harta, kekuasaan dan kesenangan perseorangan ada kecenderungan dalam masyarakat yang permisif lunak untuk menutup mata terhadap pelanggaran hukum. Hal ini terutama kentara dalam masa perubahan sosial, ekonomi dan politik yang berlangsung cepat.

Dalil keempat adalah bahwa kejahatan bergandengan erat dengan pembangunan. Terutama pembangunan dengan ketimpangan membenihkan perlawanan yang bila tidak ditanggapi meletus dalam kejahatan.

Pembangunan dan kemajuan cenderung memperlemah ikatan keluarga, sehingga terjadi pertumbuhan kehidupan tanpa ikatan sosial kekeluargaan.

Kemajuan harta dan kekayaan membuka kesempatan pula bagi tumbuhnya kejahatan harta.

Yang muda, bujangan dan pengangguran terlibat dalam kejahatan sebagai pengganti ketidak-bedaannya (powerlessness), atau kejahatan sebagai pengganti kemiskinannya dengan harta, dan kejahatan sebagai pengganti kehilangan makna hidup.

Kejahatan erat bergandengan dengan pengangguran, marginalisasi dan alinasi (pengasingan) dalam masyarakat.

Tingkat kejahatan juga melesat maju dengan urbanisasi, terutama di negara berkembang. Kehilangan ikatan sosial yang dikenal di desa untuk tenggelam dalam hidup perkotaan yang tadinya disangka penuh harapan membawa anak-anak muda mudah bergabung dengan sesama dalam gerombolan penjahat (gangs). Daya tarik masuk gerombolan bukan sebagai perlawanan terhadap sistem nilai masyarakat yang berlaku, tetapi

terutama dipicu oleh anggapan bahwa opsi (option) lain untuk hidup normal tertutup atau sangat tidak menarik. Maka keganasan sikap gerombolan ini sangat dipengaruhi oleh cara kita menanggapi. Penyiksaan kasar terhadap mereka akan mengundang reaksi yang lebih keras. Masalahnya adalah bahwa gerombolan anak-anak muda ini sendiri bingung dalam menanggapi perubahan masyarakat yang begitu cepat akibat pembangunan. Dalam hubungan ini maka pola pendekatan sosial yang lazimnya ditempuh kepolisian lebih mapan.

Dengan berkembangnya kejahatan seperti ini maka kebijakan menanggapi kejahatan haruslah ditempatkan dalam konteks sosial yang luas. Pengangguran, putusannya ikatan keluarga, longgarnya jaringan hubungan sosial paguyuban, marginalisasi dan alinasi diri dalam masyarakat, semua ini menjadi benih bagi tumbuhnya kejahatan. Kejahatan bukanlah peristiwa yang berlangsung dalam isolasi. Ia bergandengan erat dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang berubah kencang akibat pembangunan.

Dalam kaitan inilah sangat penting bahwa penanggulangan kejahatan dilaksanakan dengan pendekatan sosial. Pembinaan masyarakat yang dianut kepolisian adalah terapi utama dalam mencegah tumbuh-kembangnya kejahatan.

Sekretaris Jenderal Perserikatan

Bangsa-Bangsa, Boutros-Boutros Gali dalam "Agenda of Peace" pernah meramalkan bahwa dimasa depan sedikit kemungkinan meletusnya perang antar negara secara besar-besaran. Namun yang bakal meningkat adalah sengketa antar kelompok masyarakat di dalam negara, yang dipicu oleh perubahan sosial, ekonomi dan politik yang berlangsung cepat. Ini berarti bahwa dimasa depan menjadi sangat penting kemampuan membina masyarakat mencegah dan mengatasi sengketa sosial, ekonomi dan politik di dalam negerinya masing-masing.

Pembinaan masyarakat secara aktif juga berarti menyalurkan energi masyarakat dalam kegiatan memperbaiki tingkat kehidupan serta meningkatkan harkat dirinya. Dalam kaitan inilah kebebasan berorganisasi, kebebasan berpendapat, keleluasaan mengembangkan lembaga swadaya masyarakat dan perluasan kemungkinan pemberdayaan diri secara mandiri perlu dirangsang-tumbuhkan.

Dengan pendekatan sosial seperti ini masyarakat dimatangkan untuk mengembangkan sistem nilai yang berketahanan menanggapi kejahatan.

Jika meletus kejahatan maka sumbernya adalah masyarakat itu sendiri. Karena itu maka masyarakat yang matang berketahanan sosial memiliki kemampuan untuk meredam kejahatan.

Hal ini menuntut ciri-ciri Polisi

Pembangunan, yakni sosok kepolisian yang mampu membangun kehidupan masyarakat yang tangguh menanggapi dampak negatif pembangunan dan secara pro-aktif memberdayakan masyarakat mampu mengembangkan peri-kehidupan manusiawi di jalur keterbukaan, keadilan dan kesejahteraan.

Dengan semangat inilah ingin saya sambut wisuda sarjana Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian pada Lustrumnya kesepuluh hari ini.

Saudara menyelesaikan pendidikan tinggi Ilmu Kepolisian pada saat yang sangat bersejarah, yakni berakhirnya limapuluh tahun pertama proses pendidikan PTIK untuk membawa kita memasuki abad ke-21 dalam limapuluh tahun akan datang.

Indonesia dan dunia akan mengalami perubahan yang penting dalam masa datang ini. Adalah dalam abad ke-21 yang sebentar lagi kita masuki, saudara wisudawan diharapkan mendharma-baktikan diri pada Ibu Pertiwi Indonesia khususnya dan umat manusia sedunia umumnya.

Keberhasilan saudara dalam pengabdian dimasa datang ini tidak hanya bergantung pada perbekalan interlektual yang diterima dari Alma Mater PTIK ini, tetapi terutama ditentukan oleh karakter pribadi dan kadar iman serta taqwa yang saudara miliki dalam kehidupan beragama apapun.

Pembangunan adalah perubahan dan perubahan dapat memberi dam-

pak negatif kejahatan, tetapi juga dampak positif kebaikan bagi masyarakat. Maka usahakanlah agar saudara menjadi penegak hukum yang adil, melaksanakan tugas selaku pengayom dalam melindungi dan melayani masyarakat dan jadikanlah dirimu pembimbing masyarakat di jalan kebenaran dan keadilan.

Adalah dengan sikap dan semangat ini saya mengajak saudara menanggapi tantangan masa depan dan membangun Polisi Pembangunan dalam dirimu dan masyarakat, sebagai Abdi Utama Nusa Bangsa, dan Warga Negara Utama yang mampu menjaga ketertiban pribadi Rakyat kita.

Dirgahayu 50 tahun PTIK!
Dirgahayu Hari Bhayangkara ke-50!

Semoga Tuhan senantiasa memberkahi semua anggota Kepolisian Republik Indonesia di mana saja ia bertugas, dan wisudawan serta Pimpinan PTIK khususnya dalam pengabdianya kepada Masyarakat, Bangsa, Negara dan Umat Manusia sedunia.

Bacaan :

1. Harsja W. Bachtiar, **Ilmu Kepolisian**, Grasindo, 1994;
2. Awaloedin Djamin, **Administrasi Kepolisian**, Sanyata Sumanasa Wira, 1995;
3. Stanley Fischer, **Sustaining Growth in the ASEAN Countries**, Jakarta 1996;
4. Biro Pusat Statistik, **Tinjauan Ekonomi Regional Indonesia 1988-1993**;
5. Biro Pusat Statistik, **Kriminal Survey Susenas 1994**;
6. UNRISD, **States of Disarray**, March 1995;
7. Secretary General UNO, **Agenda of Peace**, New York, 1994;
8. **World Development Report 1995**;
9. Susan Rose-Ackerman, **Corruption**, Academic Press, New York 1978;
10. Klaus Schwab Editor, **Overcoming Indifference**, New York Press '95.

206

PERKEMBANGAN DAN ARTI ILMU KEPOLISIAN DI INDONESIA

Oleh Drs. Hadi Saputro *)

I. Pendahuluan

1. Karya tulis ini disusun dalam rangka peringatan 50 tahun Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Memang perkembangan ilmu kepolisian di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari keberadaan PTIK, karena PTIK merupakan satu-satunya wahana di mana cabang ilmu ini dikembangkan.

PTIK mengemban fungsi ganda, yang pertama ialah mula-mula sebagai lembaga pendidikan yang memberikan "akademische vorming" bagi kader-kader kepolisian yang akan mampu mengemban tugas berat di dalam suatu lingkungan masyarakat yang baru saja melepaskan diri dari penguasaan dan penindasan kekuatan asing dan membentuk suatu cita-cita negara (ideal state). Dan fungsi kedua yang kemudian berkembang ialah suatu lembaga-lembaga yang bisa mengembangkan cabang ilmu baru, ilmu kepolisian, yang akan bisa menopang pelaksanaan "mission" yang diletakkan pada bahu para alumnusnya.

Sejarah PTIK selama 50 tahun telah menunjukkan pelaksanaan kedua fungsi tersebut secara sekaligus

(simultan), melalui piranti-piranti yang melekat pada lembaga, antara lain :

- a. Para Dosen yang menanamkan pemahaman lingkup ilmu kepolisian, serta para mahasiswa yang menyerap dan mendalami, sebagai bahan dasar diamalkan dalam praktek kepolisian di kemudian hari.
- b. Perpustakaan PTIK yang menyediakan bahan acuan untuk pengkajian dan penelitian, penyusunan konsep-konsep dan teori-teori dalam berbagai bidang ilmu kepolisian, sehingga memungkinkan upaya pengembangannya.
- c. Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Kepolisian (PPITK) beserta Kelompok Ahlinya, yang berkewajiban untuk merencanakan dan melakukan kegiatan penelitian praktek kepolisian, yang hasil-hasilnya berfungsi untuk mengembangkan lembaga maupun muatan ilmu, dan memberikan arah pada perkembangannya di kemudian hari.
- d. Majalah ilmu kepolisian "BHAYANGKARA", sebagai media untuk menampung dan penyebaran gagasan baru mengenai ikhwal kepolisian, baik yang dite-

*) Penulis adalah mantan wadekan dan dosen senior PTIK.